

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Razak, 2021, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Litera.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Agustina, Rosa, 2015, *Hukum Perdata*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: Salemba Medika.

Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *hukum pidana malpraktik medik tinjauan dan perspektif medikolegal*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Azrul Aswar, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta: Binarupa Aksara, Edisi Ketiga.

PPNI Provinsi Sulawesi Selatan, 2017, *Buku Putih 33 Area Keperawatan (RS Universitas Hasanuddin dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo)*. Makassar:

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Cecep Triwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

F. Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJ.

Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media.



ntjang, 2000, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Indar, 2017, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Indra Bastian Suryono, 2011, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, Jakarta: Salemba Medika.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- J. Guwandi, 2007, *Dokter, Pasien dan Hukum*, Jakarta: Balai Penerbit UI.
- Konsil kedokteran Indonesia, 2012. *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Mimin Emi Suhaemi, 2004, *Etika Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Momon Sudarma, 2008, *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Yogyakarta: Salemba Medika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normatif dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neng Ayu Rosita, 2022, *Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan, Dalam: Etika Profesi Hukum Kesehatan*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum administrasi Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan J dan Sudrajat. 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- S.F. Marbun, *Peradilan Admistrasi Negara dan Upaya Administrasf Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.



- o, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- o Notoatmodjo, 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*, Jakarta:

Rineka Cipta.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerodibroto, Soenarto, 2002, *KUHP & KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

Veronica Komalawati, 2002, *Peran Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wiku Adisasmito, 2012, *Sistem Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikuro, 1974, *Azas-azas Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.

TESIS

Hudi Purnawan, 2017, *Diskresi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Kepada Perawat (Studi Di Kotawaringin Timur)*, Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muhtadi, 2013, *Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medik Kepada Perawat di Puskesmas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tarsianus Golo, 2019, *Pelimpahan wewenang dokter kepada perawat dalam melakukan tindakan medis*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Surakarta.



JURNAL

Astuti, D. R., 2019, *Motif Perawat sebagai Profesi dan Pelaku Komunikasi Terapeutik*, *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 3 Nomor 2, 192.

Ayih Sutarih, 2018, *Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, *Hermeneutika*, Volume 2, Nomor 1.

Aning Pattypeilohy, et al, 2018, *Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Kepada Ners Ditinjau Dari Aspek Pidana Dan Perdata*, *Jurnal Hukum Legality* Volume 25 Nomor 2.

Dipo Pramudito dan Gunawan Widjaja, 2022, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelimpahan Wewenang Beda Profesi Kesehatan*, *Cross-border* Volume 5 Nomor 1.

Endang Sutrisno, MC Inge Hartini et all, 2020, *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Health Care-Associated Infections (Hais)*, *Ermeneutika* Vol. 4, NO. 1, Februari.

Erni Agustina et all, 2018, *Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No, 191.

Khusnul Huda dan Mokhammad Khoirul Huda, 2021, *Perlindungan Hukum Perawat Atas Pelimpahan Wewenang dari Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Jahit Luka di IGD Rumah Sakit*. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Volume 1 Nomor 1, Universitas Hang Tuah.

Liza Salawati, 2020, *Penerapan Keselamatan Pasien Rumah Sakit*, *Jurnal Averrous* Volume 6 No.1 Mei.

Nurhalimah, Siti, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia*. 'ADALAH.

Putra. Gigih Sanjaya, 2020, *Implikasi Tanggungjawab Hukum Atasindakan Malpraktik yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia*. *hammadiyah Law Review*.



- Rafael, P. S, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Malpraktek Kedokteran Dalam Kaitannya Dengan Masalah Pembuktian*. *Lex crimen*, 8(8).
- Sri Yani *et all*, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Pelimpahan Kewenangan Pada Tindakan Kedokteran*, *Jurnal Kesehatan Mananrang* Volume 6 Nomor 1.
- Stefany B. Sandiata, 2013, *Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah*, *Lex Administratum*, Vol.I No. 2.
- Vitrianingsih, Yeni, & Budiarsih, Budiarsih, 2019, *Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis Dari Perspektif Hukum*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor .02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan praktik Perawat



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013
tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017
Tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018
tentang Pelayanan Kegawatdaruratan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2014 Tentang Keperawatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983 Tahun 1992
Tentang Pedoman Rumah Sakit Umum

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239 Tahun
2001 Tentang Registrasi dan Praktik Perawat

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/425 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi
Perawat

WEBSITE

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, 2022.
Pemerataan Dokter Spesialis Lewat Academic Health System.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/pemerataan-dokter-spesialis-lewat-academic-health-system>

Maharrani Anindhita *et al*, 2020, *Distribusi tenaga kesehatan tak kunjung merata*. Diambil dari Lokadata: <https://lokadata.id/artikel/distribusi-tenaga-kesehatan-tak-kunjung-merata>

The Global Health Observatory. *Medical Doctors (Per 10 000 Population)*.



[https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-tails/GHO/Medical-Doctors-\(Per-10-000-Population\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-tails/GHO/Medical-Doctors-(Per-10-000-Population))

National Library of Medicine, 2023. *Emergency Department Triage*.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557583>



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LAMPIRAN



Foto wawancara dengan Kepala Ruangan Instalasi Gawat Darurat RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto



Foto wawancara dengan Ketua Komite Medik RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto



Foto wawancara dengan Ketua Komite Keperawatan RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Takakar



Foto wawancara dengan Sekretaris Komite Medik RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Takakar





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 587219, 584686. FAX (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245 E-mail : fh-uh@indosat.net.id

Nomor : 6673/UN4.5.1/PT.01.04/2023
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 September 2023

Kepada
Yth. : RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Azizah Idris
Nomor Pokok : B012221055
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)
Konsentrasi : Hukum Kesehatan
Judul Penelitian : Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Dokter Kepada Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Gawat Darurat

Pembimbing : Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn.

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. Maskun, SH., LLM.
NIP. 187611291999031005

Tembusan :
1. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum FH-UH,
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan
3. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 25 September 2023

Nomor : 364/IP-DPMPTSP/IX/2023
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Di Rektur RSUD H. Padjonga Daeng
Ngalle Kab. Takalar
Di-
Takalar

Berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi UNHAS Program Pascasarjana Nomor : 6673/UN4.5.1/PT.01.04/2023, Tanggal 21 September 2023 perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor 070/370/BKBP/IX/2023 tanggal 25 September 2023, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : NUR AZIZAH IDRIS
Tempat Tanggal Lahir : Unjung Pandang, 07 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2) UNHAS Makassar
Alamat : BTN Minasa Upa Blok N5 No 26 Desa/Kel. Minasa Upa
Kec. Rappocini Kota Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Tesis*, dengan judul :

**“PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS DOKTER KEPADA PERAWAT
DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT”**

Yang akan dilaksanakan : September s/d Oktober 2023
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb.

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan Kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat ;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Tesis* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.



Kepala Dinas,

SETIAN MAH KASIM, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
No. : 19650831 199203 2 007

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemasiswaan UNHAS Makassar di Makassar;
5. Peringgal.





PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
RSUD H. PADJONGA DAENG NGALLE

Jalan H. Ince Husain Dg. Parani No.1 Kec. Pattallassang Kab. Takalar
Sulawesi Selatan Kode Pos 92211

Telp : (0418) 21065 e-mail: rsud hpdn@yahoo.co.id, web: http://rsudhpdn.takalarkab.go.id



SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 026 / 445 / RSUD-HPDN/ PM /X/2023

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi UNHAS Program Pascasarjana Nomor : 6677/UN4.5.1/PT.01.04/2023, Tanggal 21 September 2023 perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor 070/366/BKBP/X/2023 tanggal 25 September 2023,, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : NUR AZIZAH IDRIS
Tempat/tanggalLahir : Ujung Pandang, 07 Juli 1993
Pekerjaan : Mahasiswa (i) S2 Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : BTN Minasa Upa Blok N5 No.26 ,Desa/Kel. Minasa Upa
Kec. Rappocini, Kota Makassar

Yang tersebut namanya di atas benar telah diberikan izin untuk melaksanakan Penelitian dengan judul:

**"PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS DOKTER KEPADA PERAWAT DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT "**

Yang akan dilaksanakan : 02 Oktober s/d 02 November 2023

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan beberapa hal:

1. Izin melakukan penelitian diberikan untuk keperluan akademik
2. Waktu pengambilan data harus dilakukan diwaktu kerja
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *skripsi* kepada RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar (Diklat)
4. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan tersebut di atas

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 02 Oktober 2023
Ketua Diklat

ERNAWATI S., S.Kep. M.Kes
Nip.19790919 200502 2 004

